

# PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

Arini Permatasari

## *Abstract*

The research conducted by the writer is written in the form of a thesis with the title "IMPLEMENTATION OF CHILDREN COACHING PROGRAM POLICY PROGRAM IN THE SOCIAL BANDUNG DISTRICT".

The purpose of this study is to describe the implementation of policies related to neglected child development programs in the Bandung District Social Service. Researchers used the Van Metter and Van Horn Implementation model in Agustino who argued that the top-down approach model formulated by Van Metter and Van Horn was called the A model of the policy implementation. The research method used by the writer is descriptive analysis with a qualitative approach. While the data collection techniques that the authors use in this study are observation of interviews, documentation, triangulation or combination. The data analysis technique used in this study is qualitative data analysis according to Spradley in Moleong.

Based on the results of research that the author has done shows that in the neglected child coaching program in the Bandung Regency Social Service namely human resources in serving neglected children administration is still lacking.

***Keywords: Policy Implementation, Bandung Regency Social Service, Neglected Child Development Program***

Arini Permatasari Dosen Fisip Universitas Nurtanio Bandung

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu bidang perlindungan sosial diperuntukkan bagi penduduk miskin dan rentan khususnya, yaitu bagi penyandang permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Perlindungan sosial juga masuk ke dalam lingkup yang sangat penting didalam sebuah susunan suatu kebijakan yang berfungsi untuk menurunkan tingkat suatu kemiskinan. Perlindungan sosial itu sendiri cakupannya antara lain seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, khususnya penduduk miskin yang rentan supaya mereka dapat bertahan dari resiko-resiko kehidupan yang tidak

pasti sehingga tidak lebih miskin dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik lagi, selain itu seorang anak terlantar dapat dikatakan terlantar bukan sekedar karena mereka tidak memiliki salah satu dari orang tua ataupun kedua orang tuanya atau juga karena faktor ekonomi dari keluarganya yang menjadikan mereka tidak diperhatikan, melainkan dalam anak terlantar disini, yaitu seorang anak yang dimana anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, tidak memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih layak, serta tidak adanya perhatian dari orang tuanya ataupun kerabatnya, atau anak tersebut tidak diinginkan kelahirannya. Dalam kondisi seperti ini, penelantaran anak merupakan sebuah tindakan yang tidak

baik karena membiarkan anak-anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, dan jika anak tersebut dibiarkan berada dalam fase rentan yang mengakibatkan mereka akan tumbuh kembang dengan tidak wajar bahkan mereka cenderung lebih terabaikan oleh orangtua ataupun kerabatnya, bagi anak yang jauh dari kasih sayang, perlindungan dan juga pengawasan dari keluarganya mereka pada umumnya seringkali terpengaruh untuk terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang salah bahkan bisa menjadi dampak buruk bagi mereka ataupun orang-orang disekitarnya. Maka dari itu diperlukannya suatu kebijakan untuk mengatasi anak-anak terlantar tersebut serta diperlukannya sebuah kebijakan antara lain tentang perlindungan sosial dan juga penanggulangan dalam suatu kemiskinan yang telah diamanatkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD RI Tahun 1945 salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun pada kenyataannya seperti yang sering terjadi saat ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan, banyak anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti banyaknya anak-anak terlantar yang termasuk dalam jenis permasalahan yang membutuhkan suatu perlindungan ekstra. Pada dasarnya anak-anak terlantar itu sendiri adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar juga salah satu dari beberapa masalah sosial anak yang juga membutuhkan perhatian secara khusus, oleh karena itu diperlukan perlindungan untuk anak yang bertujuan agar terjalinnya dan terpenuhinya hak-hak anak tersebut

agar dapat hidup dengan layak, tumbuh, berkembang dengan baik.

Selanjutnya dalam pasal 34 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, maka Negara wajib mengembangkan suatu sistem untuk perlindungan sosial yang bersifat nasional dan komprehensif, serta selain itu mensejahterakan rakyatnya. Undang-Undang Republik Indonesia pun menjamin perlindungan kepada anak-anak, kemudian pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan juga pengajaran di dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara pun menjamin perlindungan suatu anak dan bahkan semua anak itupun berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program yaitu untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Masalah sosial anak sebenarnya perlu penanganan yang lebih serius dan juga perlunya kebijakan serta program yang dimana untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai suatu instansi yang bertanggung jawab di dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial pada anak. Secara teknis Dinas Sosial Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas penanganan masalah tersebut karena berperan dalam bidang perbantuan PMKS pada anak, yaitu Program Pembinaan Anak Terlantar. Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak terlantar di

kabupaten Bandung merupakan sebuah fenomena yang perlu segera ditangani dengan lebih serius, karena jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan sosial yang baru.

Berikut adalah kriteria anak terlantar :

1. Anak (laki-laki atau perempuan) usia 6-18 tahun
2. Anak yatim, piatu, yatim piatu yang tidak terpenuhi kebutuhan
3. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan
4. Anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orangtua atau keluarga
5. Kehilangan hak asuh dari orangtua atau keluarga

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat jumlah permasalahan sosial menurut jenisnya di Jawa Barat, anak terlantar di Kabupaten Bandung berjumlah 7.625 anak. Dilihat dari data tersebut, keadaan Kabupaten Bandung secara keseluruhan berdasarkan pertumbuhan anak terlantar di Provinsi Jawa Barat ada pada posisi ke-3. Posisi pertama jumlah anak terlantar di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sukabumi 61.239, Posisi ke-2, yaitu Kabupaten Indramayu anak terlantar berjumlah 13.940.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam menangani masalah sosial anak khususnya dalam program pembinaan anak terlantar, yaitu mulai dari banyaknya penduduk-penduduk pendatang dan juga tingginya tingkat kebutuhan hidup serta sempitnya lapangan pekerjaan. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah sehingga ini menjadikan suatu fenomena yang sudah mulai terlihat nyata di Kabupaten Bandung yang berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan anak-anak terlantar itu sendiri. Maka

dari itu untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kabupaten Bandung, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua aspek, mulai dari aspek pemerintah, peran dari orang tua maupun kerabatnya dan juga dari masyarakat sekitar ataupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendekatan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada keterlantaran anak sebagai upaya agar anak-anak tersebut terpenuhi hak-hak inklusinya : Hak dasar dalam indikator ini adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang yang bersifat fundamental dan didalamnya juga telah melekat suatu kewajiban serta tanggungjawab yang besar. Capaian pada penerima manfaat meliputi pada hak untuk hidup, hak memperoleh perawatan, hak diperlakukan adil dan hak mendapatkan identitas diri. Dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program yang terencana yaitu usaha pencegahan dan usaha penanggulangan serta rehabilitasi sosial. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan yang didasarkan oleh ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena dapat mewujudkan suatu kesejahteraan untuk masyarakat khususnya kesejahteraan anak yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan UU No. 4 tahun 1974 diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2013. Pembinaan anak terlantar, pemerintah maupun pihak swasta harus benar-benar mampu memilih prioritas yang tepat dan penting untuk menentukan sebuah

pembangunan dari sumber daya manusia.

Dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengimplementasian dari kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, maka dari penelitian tersebut penulis berniat untuk menulis sebuah jurnal yang berjudul “PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG”.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan rancangan atau metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Creswell dalam Sugiyono (2017:3) menyatakan bahwa : “Penelitian kualitatif ialah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu & kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan”. Selanjutnya Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:04) mendefinisikan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Sedangkan menurut David Williams dalam Moleong (2017:05) menulis bahwa : “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang ataupun peneliti yang tertarik secara alamiah”. Jelas definisi ini memberi sebuah gambaran tersendiri bahwa dalam penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode

alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Dari kajian-kajian dalam definisi-definisi tersebut di atas, maka dapatlah disintensikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya suatu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks husus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian jenis yang lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a. Latar Alamiah
- b. Manusia Sebagai Alat (instrumen )
- c. Metode Kualitatif
- d. Analisis data secara induktif
- e. Teori Dari dasar (*Grounded theory*)
- f. Deskriptif
- g. Lebih mementingkan proses daripada hasil
- h. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
- j. Desain yang bersifat sementara
- k. Hasil penelitian yang disepakati dan dirundingkan bersama
- l.

### 2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dimana peneliti fokus pada proses dan hasil implementasi kebijakan tersebut.

- a. Proses dari implementasi suatu kebijakan yang merupakan serangkaian dari kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan

oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan. Proses dari implementasi kebijakan itu sendiri akan dilihat dari 6 variabel penting di dalam pencapaian suatu implementasi, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam model implementasi Van Meter & Van Horn, yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia dan prasarana, karakteristik agen pelaksana, sikap (*disposition*) para pelaksana, aktivitas pelaksana dan komunikasi antar-organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

- b. Hasil kebijakan merupakan pencapaian tujuan atau sasaran yang diraih dari kebijakan yang telah ditetapkan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data primer, dimana data bersumber langsung dari informan atau responden yang ditentukan tentang Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Selain itu, dikumpulkan pula data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen fisik yang berfungsi sebagai penambah data primer.

### 4. Informan Penelitian

Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan observasi dengan beberapa informan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang terdiri dari 3 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, 1 (satu) orang Pengelola pelayanan Rehabilitasi Sosial, 1 (1) orang Sub Bagian Program dan data, dan 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat, yaitu Kasi Kesra Desa Cilampeni. Informasi yang ditangkap dari jawaban para informan tersebut dianggap cukup sehingga tidak diperlukan kembali penambahan informan.

### a. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh suatu data. Dalam Sugiyono (2017:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada sebuah laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan suatu data dapat menggunakan sumber primer, dan juga sumber sekunder. Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan demikian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

### b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang dipergunakan di dalam penelitian ini, mengacu pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Spradley dalam Moleong (2017:302), mengemukakan bahwa macam analisis data kualitatif sebagai berikut:

#### 1) Analisis Domein

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek/ penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pertanyaan *grand and minitour*. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

#### 2) Analisis Taksonomi

Untuk mengetahui struktur internalnya, maka terlebih dahulu domain yang dipilih tersebut harus dijabarkan menjadi lebih rinci. Dilakukan dengan observasi yang terfokus.

### 3) Analisis Komponen

Dalam Moleong (2017:307) ada delapan langkah yang dilakukan dalam analisis komponen yaitu :

- a) Memilih domain yang akan dianalisis
  - b) Mengidentifikasi seluruh kontras yang telah ditemukan
  - c) Menyiapkan lembar paradigma
  - d) Mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua nilai Menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
  - e) Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
  - f) Menyiapkan paradigma lengkap
- #### 4) Analisis Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk lebih memahami secara holistik pandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa temuan hasil penelitian atau kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dari temuan penelitian berdasarkan variabel, yaitu :

### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Ukuran dan tujuan dari kebijakan ini cukup jelas yang berarti untuk mempermudah masyarakat, dimana masyarakat yang akan melaporkan perihal anak terlantar bisa langsung lapor ke Bagian Puskesmas ataupun bisa melapor ke Kantor Desa Bagian Kesejahteraan Sosial di wilayah tempat tinggal mereka dan kalau

mereka ingin melapor langsung ke Dinas Sosial sebenarnya bisa saja, namun mereka lapor ke Bagian Pendataan dan tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu tetap harus masuk kedalam daftar tunggu, karena sebetulnya dalam program pembinaan anak terlantar itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dan diperhitungkan dengan matang oleh pihak Dinas Sosial dan tidak bisa tiba-tiba langsung ditindak lanjuti sehingga tetap membutuhkan waktu yang lebih banyak, namun pada dasarnya peraturan tersebut cukup baik karena tertata dengan rapi.

### 2. Sumber daya.

Sumber daya manusia masih kekurangan karena dalam penanganan PMKS cakupannya cukup luas tetapi untuk pekerja sosialnya kurang, bahkan untuk satu pegawai tupoksinya merangkap, tetapi untuk fasilitas sudah cukup memadai.

### 3. Komunikasi antar-organisasi & aktivitas pelaksana

Komunikasi antar instansi sudah cukup baik, dimana suatu komunikasi sering mereka lakukan agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman diantara satu sama lain. Berdasarkan temuan peneliti tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa diantara kenyataan yang ada saat ini, jika dianalisa dengan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn tidaklah semua indikator yang diajukan dapat terimplementasikan didalam implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar. Dinas Sosial Kabupaten Bandung adalah tempat pemberian pelayanan ataupun bantuan dan untuk menghadapi kendala-kendala dalam implementasinya, namun kendala-kendala tersebut tidak menghalangi Dinas Sosial

Kabupaten Bandung bahkan tidak bisa dijadikan suatu alasan suatu kebijakan yang dianggap baik oleh masyarakat, serta berbagai langkah dan upaya sudah semestinya dilakukan agar implementasi tersebut berjalan dengan optimal

4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil tentunya harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut dan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaksesuaian dari para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena itu diperlukan penerimaan yang lebih baik dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih baik dan sesuai dengan tanggungjawab yang dimiliki. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya keramahan, kejujuran serta komitmen yang tinggi, dimana para pelaksana tersebut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka para pelaksana harusnya melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sepenuh hati. Dalam observasi, peneliti melihat bahwa sikap para pelaksana didalam pelaksanaan implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung cukup berjalan dengan baik.

5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan sebuah mekanisme sekaligus syarat utama didalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. komunikasi dan koordinasi dari pihak dinas sosial dengan masyarakat sudah optimal, karena dari koordinasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat/PMKS khususnya anak terlantar membuat anak-anak menjadi lebih mandiri dan menjadikan mereka lebih sadar akan pentingnya kehidupan yang mereka miliki.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik, upaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, hendaknya dirancang dengan kerangka acuan teori yang kuat, disusun kolerasi yang jelas antara kebijakan dan kolerasinya, dilakukannya sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah, dilakukannya pemantauan secara terus-menerus dan kondisi ekonomi, sosial dan politik didalam masyarakat Kabupaten Bandung cukup mempengaruhi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

a. Ukuran dan tujuan

1) Dari adanya kebijakan Program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Pelaksanaan kebijakan program tersebut cukup baik.

2) Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dimana masyarakat yang akan melaporkan perihal anak terlantar bisa langsung lapor ke Bagian Puskesmas ataupun bisa melapor ke Kantor Desa Bagian Kesejahteraan Sosial di wilayah tempat tinggal mereka, dan kalau mereka ingin melapor langsung ke Dinas Sosial sebenarnya bisa saja, namun mereka lapor ke Bagian Pendataan dan tetap harus terlebih dahulu mengikuti prosedur yang berlaku yaitu tetap harus masuk kedalam daftar tunggu, karena sebetulnya di dalam program pembinaan anak terlantar itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dan diperhitungkan dengan matang oleh pihak Dinas Sosial dan tidak bisa tiba-tiba langsung ditindaklanjuti sehingga tetap membutuhkan waktu yang lebih banyak. Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, pertama untuk mempermudah dalam proses penanganan yang termasuk dalam program pembinaan anak terlantar dikeluarkanlah Perda Kabupaten Bandung No. 10 tahun 2012 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dimana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk dalam PMKS

b. Sumber daya

- 1) Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial di Kabupaten Bandung masih kurang baik.
- 2) Hambatan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu sumber daya manusia dalam melayani administrasi anak terlantar masih kurang dalam hal kualitas.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu dimasa yang akan datang agar ada penambahan

pegawai agar lebih memantau dalam menyelesaikan dalam penanganan PMKS dan pastinya agar lebih efektif dan efisien dalam menunjang kebijakan tersebut.

c. Karakteristik agen pelaksana

- 1) Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial di Kabupaten Bandung sebagai pelaksana administrasi mempengaruhi keberhasilan dari tujuan kebijakan.
- 2) Hambatan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu : Cakupan wilayah implementasi perlu untuk diperhitungkan kembali, karena pada dasarnya terlalu luas cakupannya terlalu besar pula agen yang harus dilibatkan
- 3) Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu : Karakteristik pelaksana dengan adanya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya program pembinaan anak terlantar akan langsung ditangani oleh Dinas Sosial yang berawal dari data BPS lalu disebar ke Kementerian Sosial selanjutnya ke Provinsi kemudian ke kota/kabupaten sesuai dengan kategori dan setelah itu data tersebut disebar ke PUSKESOS dan diketahui oleh Kaur Kesra yang berkoordinasi dengan RT/RW, setelah dicek lalu data tersebut diserahkan ke desa dan diserahkan ke Dinas Sosial melalui Musrenbang kemudian dimusyawarahkan selanjutnya diproses.

d. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

- 1) Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan berhasil tentunya harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut dan sampai saat ini cukup optimal karena dalam sikap penyampaian sudah baik.
- 2) Hambatan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu sering diakibatkan karena

ketidaksesuaian dari para pelaksana terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

- 3) Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu dalam pelayanan penanganan PMKS atau apapun memiliki karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya keramahan, kejujuran serta komitmen yang tinggi, dimana para pelaksana tersebut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka para pelaksana tersebut harusnya melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sepenuh hati.
- e. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana
- 1) Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung sudah lumayan baik, sejauh ini aktivasi komunikasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar masih terus dimaksimalkan agar mempermudah masyarakat.
  - 2) Hambatan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu dalam koordinasi harus jelas dan tersampaikan dengan baik.
  - 3) Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu dalam penyampaian informasi ataupun suatu program dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung harus jelas tersampaikan dengan baik, dengan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya ataupun apa yang harus mereka lakukan, pelaksana utama kebijakan dalam hal ini adalah para implementor dengan instansi-

instansi yang terkait dan saling berkoordinasi satu sama lain.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

- 1) Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial di Kabupaten Bandung cukup mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 2) Hambatan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, yaitu banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan, juga banyaknya orangtua yang tidak paham akan tumbuh kembang anak tersebut.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu dilakukannya suatu sosialisasi dimana sebuah kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah dan dilakukannya pemantauan secara terus menerus.

## **2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung, diantaranya :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Bandung lebih bekerja sama dengan masyarakat dan PUSKESOS agar program pembinaan anak terlantar bisa berjalan efektif dan efisien selain itu adanya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat setempat
- b. Adanya tempat rehabilitasi sosial agar mempermudah dalam penanganan anak-anak terlantar dan lebih terpantau dengan mudah.
- c. Masyarakat lebih peduli lagi dan sadar akan keberadaan anak terlantar, selain itu juga masyarakat pun bisa kerjasama dengan pihak pemerintah yaitu dengan melaporkan keberadaan anak terlantar tersebut kepada pihak RT/RW setempat.

## **E. REFERENSI**

## Buku-buku

Suyanto, Bagong, 2016. Masalah Sosial Anak, (Ed Revisi), Jakarta : Prenada Media Group

Purwanto dan Sulistyastuti, Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gava Media

Moleong, Lexy J., 2017. Metode Penelitian Kualitatif, (Ed Revisi), Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Agustino, Leo, 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta

Pasolong Harbani, 2017. Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta

## Sumber bacaan lain :

### 1. Peraturan Perundang-undangan

UUD RI Tahun 1945 salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan.

Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 9 ayat 1 tentang hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat anak dan bakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### 2. Skripsi/Tesis/Disertasi

DEA DEANTI, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi Pada Bidang Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan

Rancabali Kabupaten Bandung), 2018, Program Pendidikan Sarjana (S1) Universitas Nurtanio Bandung.

FIKRIYA ZULFA, Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, 2018, Program Pendidikan Sarjana (S1) Universitas Nurtanio Bandung.

### 3. Sumber dari Internet/Website.

Data Rencana Strategis Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung. Tahun 2016 - 2021. Dari situs World Wide Web :

<https://www.bandungkab.go.id/.../20180607113702-rencana-strategis-2016-2021.pdf>

Data Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Dari situs World Wide Web :  
<https://www.bandungkab.go.id/uploads/struktur%20terbaru.pdf>

Data Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat. Dari situs World Wide Web :  
<https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/405/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016.html>